

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Literatur

##### 2.1.1. *Corporate Governance*

*Corporate governance* dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan “pengendalian perusahaan” atau “tata kelola perusahaan”. Menurut Hidayah (2008), definisi *corporate governance* merupakan sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham yang berkepentingan dengan perusahaan (*stake holders*) seperti kreditur, *supplier*, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pimpinan dan masyarakat luas.

*Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan (*agency problems*). Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Isnanta, 2008).

*Corporate governance* menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan menurut Pranata (2007), *good corporate governance* adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Darmawati dkk (2005), inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal/investor*) dan pengendalian (*agent/manajer*). Persoalan yang muncul dalam perusahaan sehingga tidak dapat berkembang dengan baik adalah adanya tata kelola (*governance*) yang buruk. Kegagalan operasi perusahaan-perusahaan di Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi diindikasikan oleh para pakar dan peneliti karena adanya praktik *corporate governance* yang buruk. Buruknya tata kelola perusahaan adalah akibat adanya perilaku yang tidak diharapkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Untuk itulah mengetahui sebab yang mengakibatkan terjadinya *agency conflict* perlu dilakukan,

sebelum aturan demi aturan dibuat oleh pihak regulator (Arifin, 2005). Oleh karena itu *good corporate governance* menjadi suatu konsep untuk mengelola perusahaan secara baik terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor).

Konsep *corporate governance* mempunyai tujuan agar tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Apabila konsep *corporate governance* tersebut diterapkan dengan baik oleh perusahaan, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan akan menguntungkan berbagai pihak.

Dengan adanya penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan maka menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

### 2.1.2. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Tujuan *good corporate governance* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) adalah sebagai berikut:

1. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku *insider*.

2. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan.

### 3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

### 4. *Responsibility* (Responsibilitas)

*Responsibility* (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

### 5. *Independency* (Independen)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas.

Secara umum, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.

2. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan ekonomi perusahaan.
3. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan.

### **2.1.3. Struktur *Corporate Governance***

Pada prinsipnya struktur *corporate governace* merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peranan pengelola perusahaan seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit dengan pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya. Struktur *corporate governace* terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai peran serta fungsi yang berbeda, untuk lebih jelasnya struktur *corporate governace* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

#### **2.1.3.1. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah jumlah prosentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Prosentase saham tertentu

yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Jati, 2009).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan perusahaan oleh institusi atau lembaga tertentu. Kepemilikan ini mempunyai karakteristik yang kuat untuk melakukan pengawasan pada perusahaan mengingat institusi mempunyai sumberdaya dan sumberdana yang lebih kuat dibanding kepemilikan perorangan sehingga dengan pengawasan yang lebih kuat tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan.

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proposi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Aktivitas monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Permanasari, 2010).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Permanasari (2010), menyatakan bahwa kepemilikan institusional

memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.



### 2.1.3.2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah prosentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Jati, 2009). Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya prosentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer.

Besar kecilnya jumlah saham manajerial dalam perusahaan dapat *mengindikasikan* ada kesamaan (*congruence*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan dan rendahnya beban operasi terhadap penjualan (Faisal, 2005).

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik

kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Permanasari, 2010). Mekanisme pengawasan terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh karena itu salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

#### 2.1.3.3. Dewan Direksi

Komposisi dewan direksi sering digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kolusi dan dominasi direksi. Jumlah dewan direksi yang besar kurang efektif dalam memonitor manajemen. Dewan direksi sangat berpengaruh diperusahaan karena dewan direksi adalah eksekutor dalam perusahaan. Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi.

Tugas dewan direksi yaitu mengelola dan mewakili perusahaan dan juga memberikan informasi di bawah

pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit (Jensen et al, 1996 dalam Sam'ani, 2008). Anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh anggota dewan komisaris. Tugas utama dewan komisaris yaitu bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen, tetapi tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan komisaris diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ini dapat ditemukan di negara-negara seperti Indonesia, Belanda, Denmark, Jerman dan Jepang.

Dengan melihat posisi yang sejajar antara dewan komisaris dan dewan direksi (manajemen) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, mengakibatkan kedudukan dewan

komisaris di Indonesia tidak sekuat seperti dewan komisaris di *Continental Europe* karena dewan komisaris tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan dewan direksi. Dewan direksi tidak harus bertanggungjawab terhadap dewan komisaris. Bila ditinjau dari perspektif *good governance*, kedudukan yang sejajar ini dapat mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengendalian (*control*) berjalan kurang efektif karena bisa saja dewan komisaris dianggap oleh dewan direksi sebagai partner kerja, bukan sebagai pengawas kerja dewan direksi. Hal ini bisa menjadi salah satu hambatan untuk melaksanakan *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia (Arifin, 2005).

#### 2.1.3.4. Komite Audit

Komite Audit merupakan sebuah komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen. Komite audit ditugaskan untuk memberikan pengawasan pada auditor perusahaan internal dan eksternal, serta memastikan manajemen tersebut melakukan tindakan korektif yang tepat secara berkala dan dapat mengontrol kelemahan, ketidaksesuaian dengan kebijakan, hukum dan regulasi (Jati, 2009). Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Komite audit

juga dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam mengenai masalah pengendalian. Tugas-tugas komite audit adalah:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan oleh auditor internal
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan.

#### **2.1.4. Ukuran Perusahaan**

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam,

semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula dikenal dalam masyarakat (Ningsaptiti, 2010).

Faktor ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan laba. Perusahaan yang besar yang dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil. Bagi perusahaan yang stabil biasanya dapat memprediksi jumlah keuntungan di tahun-tahun mendatang karena tingkat kepastian laba sangat tinggi. Sebaliknya bagi perusahaan yang belum mapan, besar kemungkinan laba yang diperoleh juga belum stabil karena kepastian laba lebih rendah (Sembiring, 2008).

Ukuran perusahaan diprosikan dari penjualan bersih (*net sales*). Total penjualan mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Sidharta dalam Metalia, 2007).

Perusahaan yang besar mempunyai sumber daya dan sumber dana yang lebih besar serta akses yang lebih leluasa di dalam perolehan dana. Dengan hal tersebut memungkinkan perusahaan besar untuk menciptakan operasional yang dapat mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dibanding dengan perusahaan kecil yang relatif

terbatas baik dari segi sumber daya, sumber dana maupun akses perolehan dana (Putri, 2006).

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Kebutuhan dana yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan menginginkan pertumbuhan laba dan juga pertumbuhan tingkat pengembalian saham. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar hutang (Dewi, 2010).

#### **2.1.5. Kinerja Perusahaan**

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.

Rasio keuangan merupakan alat utama untuk menganalisa keuangan. Ada dua kelompok yang menganggap rasio keuangan berguna. Pertama, terdiri dari manajer yang menggunakannya untuk

mengukur dan melacak kinerja perusahaan sepanjang waktu. Kedua, pengguna rasio keuangan mencakup para analis yang merupakan pihak eksternal bagi perusahaan (Sabrina, 2010).

Berikut ini adalah beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan (Ang, 1997) dalam Sabrina (2010) adalah:

1. Rasio Likuiditas

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban *financial* yang berjangka pendek tepat pada waktunya.

2. Rasio Aktivitas

Rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri. Rasio profitabilitas dibagi menjadi enam antara lain: *Gross Profit Margin (GPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Operating Return On Assets (OPROA)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Operating Ratio (OR)*.



#### 4. Rasio Solvabilitas (*Leverage*)

Finansial *leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%.

#### 5. Rasio Pasar

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham.

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam arus kas dari sumber daya yang ada dan juga untuk perumusan perimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya (Nuraeni, 2010).

Menurut Sartono (2008), *Return on assets* (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan agar menghasilkan keuntungan. Kinerja operasi perusahaan diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan keuangannya. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba (Hakim, 2006).

Menurut Hakim (2006), ROA memiliki keunggulan, diantaranya yaitu:

1. Merupakan ukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini.
2. Mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.
3. Merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggungjawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

Namun selain memiliki keunggulan terdapat pula beberapa kelemahan atas penggunaan ROA yaitu:

1. Pengukuran kinerja dengan menggunakan ROA membuat manajer divisi memiliki kecenderungan untuk melewati proyek yang menurunkan divisional ROA, meskipun sebenarnya proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

2. Manajemen juga cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan tujuan jangka panjang.
3. Sebuah proyek dalam ROA dapat meningkatkan tujuan jangka pendek, tetapi proyek tersebut mempunyai konsekuensi negatif dalam jangka panjang. Yang berupa pemutusan beberapa tenaga penjualan, pengurangan *budget* pemasaran, dan penggunaan bahan baku yang relatif murah sehingga menurunkan kualitas produk dalam jangka panjang.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Krisis perekonomian yang melanda di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dimulai dengan adanya isu mengenai *corporate governance*. Salah satu penyebab lamanya proses pemulihan ekonomi ini dikarenakan lemahnya *corporate governance*. *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Pada dasarnya isu yang memicu kelemahan *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Dengan adanya pemisahan kepemilikan tersebut terkadang manajer dengan informasi yang dimilikinya bisa bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan

pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmetry information*), Sari (2010).

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Selain itu adanya permasalahan *agency* juga dapat dipengaruhi oleh struktur *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi dan komite audit) karena mereka memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan *corporate governance*.

Keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak terlepas dari struktur *corporate governance*, karena struktur *corporate governance* mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang mereka miliki. Kontrol yang mereka miliki tersebut diterapkan melalui *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik sehingga membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, komite audit, dewan komisaris, dewan direksi dan kemudian para pemegang saham.

Kepemilikan institusional adalah jumlah prosentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk

mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens (Jati, 2009).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Permasari (2010), menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Dengan adanya kepemilikan institusional yang merupakan bagian dari struktur *corporate governance* ini dapat terciptanya *good corporate governance* sehingga perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun dan kepemilikan institusi lain akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat. Semakin besar kepemilikan oleh institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Isnanta (2008), Nur'aeni (2010) dan Sam'ani (2010) menyatakan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja (ROA). Ujiyanto (2007) dan Kesuma (2005) melakukan penelitian dengan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (ROA).

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka manajemen akan cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan meningkatkan kepemilikan saham manajerial akan mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan (Nur'aeni, 2010). Hal tersebut mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan karena mereka memiliki kontrol untuk mewujudkan *good corporate* melalui tugasnya yang penting dalam struktur *corporate governace*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Ujiyanto (2007), Isnanta (2008) dan Jati (2009) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA). Penelitian yang berlawanan dilakukan oleh Nur'aeni (2010) dan

Kesuma (2005) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Dewan direksi sangat berpengaruh diperusahaan karena dewan direksi adalah eksekutor dalam perusahaan. Tugas dewan direksi yaitu mengelola dan mewakili perusahaan dan juga memberikan informasi di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh anggota dewan komisaris. Tugas utama dewan komisaris yaitu bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen, tetapi tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu fungsi atau peran komisaris dan direksi dalam proses peningkatan kinerja perusahaan sangat diperlukan untuk menjalankan perusahaan secara berkesinambungan sehingga terwujud *good corporate governance* yang berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan sehingga dengan meningkatnya kinerja perusahaan diharapkan juga dapat meningkatkan harga saham perusahaan sebagai indikator dari nilai perusahaan sehingga nilai perusahaan akan tercapai.

Setiawan dkk (2005), Lastanti (2008) dan Sam'ani (2008) menyatakan hasil penelitiannya bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA). Hal itu bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujianto (2007), Sari (2010) dan Jati (2009)

yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

H3 : Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Komite audit ditugaskan untuk memberikan pengawasan pada auditor perusahaan internal dan eksternal, serta memastikan manajemen tersebut melakukan tindakan korektif yang tepat secara berkala dan dapat mengontrol kelemahan, ketidaksesuaian dengan kebijakan, hukum dan regulasi (Jati, 2009). Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (Sam'ani, 2008). Apabila *good corporate governance* terwujud maka kinerja perusahaan akan meningkat pula. Sehingga komite audit berperan dalam meningkatkan kinerja perusahaan terutama dari aspek pengendalian.

Beberapa peneliti seperti Kesuma (2005), Setiawan dkk (2005) dan Sam'ani (2008) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA). Hal tersebut dikarenakan komite audit



mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan sehingga kinerja keuangan akan berjalan lebih baik. Penelitian yang berlawanan dilakukan oleh Jati (2009) dan Kemalasari (2009) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

H4 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Perusahaan yang besar mempunyai sumber daya dan sumber dana yang lebih besar serta akses yang lebih luas di dalam perolehan dana. Dengan hal tersebut memungkinkan perusahaan besar untuk menciptakan operasional yang dapat mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dibanding dengan perusahaan kecil yang relatif terbatas baik dari segi sumber daya, sumber dana maupun akses perolehan dana (Putri, 2006). Sehingga semakin besar ukuran suatu perusahaan maka kinerja keuangannya akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2006), Sari (2010), dan Sayidah (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA). Hal ini berarti perusahaan yang besar yang dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil sehingga kinerja perusahaannya akan lebih baik (Sembiring, 2008). Penelitian yang bertentangan dilakukan oleh Sugiarto (2006) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA). Hal ini berarti perusahaan yang relatif kecil yang dianggap belum mencapai

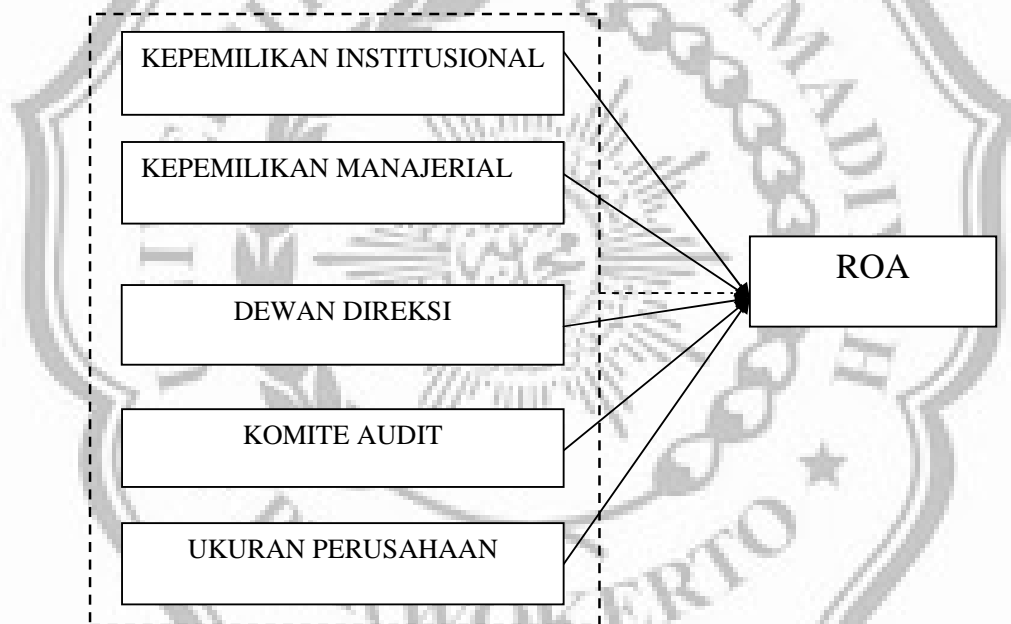
tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif belum stabil dan kurang mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan besar sehingga kinerja perusahaanya kurang baik (Sembiring, 2008).

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

**Variabel Independen (X)**

**Variabel Dependen (Y)**

**Kinerja Keuangan**



**Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran.**

### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang akan diajukan untuk mencapai tujuan penelitian adalah :

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA)

- H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA)
- H3 : Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA)
- H4 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA)
- H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA)
- H6 : Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, komite audit dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

